

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ali Abdullah, 2017, *Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen Dilengkapi dengan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan yang Relevan*, Kencana, Jakarta.
- Bambang Setyo Wahyudi, 2017, *Indonesia Mencegah*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Enrico Simanjuntak, 2018, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi dan refleksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Supandi, 2016, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Alumni, Bandung.
- H. Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indroharto, 2000, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Irvan Mawardi, 2016, *Paradigma Baru PTUN, Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Jum Anggraini, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Khairani, 2016, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing, Ditinjau dari Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja dengan Pemberi Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualism Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Ed.2, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Makhfudz, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, Dkk, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to The Indonesian Administrative Law*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rozali Abdullah, 2007, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- R. Wiyono, 2010, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wicipto Setiadi, 2001, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara : Suatu Perbandingan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yuslim, 2016, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zairin Harahap, 2010, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Perma No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

PP No. 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.

SEMA No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

C. Jurnal.

Phillipus M. Hadjon, *Artikel Tentang Wewenang*, Jurnal Yuridika, <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/5769>, Diunduh 14 Maret 2020

Tri Cahya Indra Permana, *Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-undang Administrasi Pemerintahan Ditinjau dari Access to justice*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3 November 2015, Diunduh 13 September 2019.

Mohammad Sahlan, *Artikel tentang Unsur Menyalahgunakan Kewewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi*, <http://media.neliti.com>media>, Diunduh 21 Mei 2020.

Setio Sapto Nugroho, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, <https://adoc.tips>harmonisasi-pembentukan>, Diunduh 10 Maret 2020.

Dio Ashar Wicaksana, Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia, *Fiat Justitia* Vol 1/No.1/Maret 2013, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/fiat-justitia-ed.-maret-2013.pdf>, Diunduh 22 April 2020.

D. Internet.

<https://kbbi.web.id>, Diakses 13 Februari 2020.

<http://arfinpratama.blogspot.com/2015/02/jenis-data-dan-dari-sudut-sumber-nya.html?m=1>, Diakses tanggal 21 Januari 2020.

Sovia Hasanah, Perbedaan Gugatan dan Permohonan, <https://m.hukumonline.com>detail>, Diakses 10 Mei 2020.

<https://customslawyer.wordpress.com>asas-asas-hukum>, Diakses 30 Mei 2020.

E. Sumber lain.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 25/G/2015/PTUN-MDN Tanggal 7 Juli 2015.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 176/B/2015/PT TUN-MDN tanggal 21 Desember 2015.

